

Refleksi GTRA Summit 2022 dan Desakan untuk GTRA 2023

Parid Ridwanuddin
Manajer Kampanye Pesisir dan Laut
WALHI



**Friends of
the Earth
Indonesia**



Peta Persoalan Agraria di Pesisir, Laut dan Pulau Kecil



Peta Persoalan

Tabel 1. Isu-Isu Agraria di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sumber Agraria	Isu Aktual
Tanah pesisir dan atau pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendaftaran hak atas tanah ● Privatisasi pulau-pulau kecil ● Ekspansi pertambangan udang skala besar ● Infrastruktur ● Pertambangan ● Krisis iklim ● Sawit
Perairan/laut	<ul style="list-style-type: none"> ● Reklamasi ● Konservasi ● Pertambangan ● Pariwisata ● Infrastruktur ● Perebutan sumber daya ikan dengan kapal-kapal besar ● IUU Fishing ● Krisis iklim

Sumber: WALHI (2022)

Desa-Desa Pesisir Akan Tenggelam

- Setiap tahun, 1 hektar tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut.
- **Desa pertama** yang tenggelam adalah Tambaksari, pada 1997. Saat ini masih ada 9 KK yang bertahan. **Desa kedua** yang tenggelam adalah dukuh Rejosari Senik pada 2000.
- **Desa ketiga** yang tenggelam adalah Bedono pada 2005. **Desa keempat** yang tenggelam pada 2010 adalah Mondoliko. Jumlah warga yang bertahan 95 KK dan Timbulsloko dengan total warga yang masih bertahan 150 KK.



SOLIDARITAS

Rakyat Bantu Rakyat



RUSAK: Jalan Masuk Dukuh Timbulsloko - SAYUNG - DEMAK



Karena rob, Dukuh Timbulsloko (RW 07) TERPUTUS DARI DARATAN. Satu-satunya jalan di dukuh ini adalah JALAN PANGGUNG PAPAN KAYU

Warga Dukuh Timbulsloko (RW 07) menerima solidaritas lewat:

REKENING BANK JATENG SYARIAH:
5032262124 (kode transfer 725)
a/n Masjid Jami Darul Ibad Timbulsloko
- Demak

Tiang jalan sudah reot, perlu SEGERA diganti. Badan jalan perlu diperlebar menjadi 1,5 meter supaya anak-anak tidak lagi mudah jatuh ke air laut, serta bisa dilewati saat warga membawa PASIEN dan/atau JENAZAH

Solidaritas
DIBUKA

20 Sept - 20 Okt
2022

KONTAK: 0889 8090 4704 (Soryadi) / 0812 2544 3020 (Ashar)

Desa pesisir lain di Indonesia yang terus terancam tenggelam

Provinsi Province	Letak Geografis/Geographical Location		Persentase/Percentage	
	Desa Tepi Laut	Desa Bukan Tepi Laut	Desa Tepi Laut	Desa Bukan Tepi Laut
	Seaside Villages	Non Seaside Villages	Seaside Villages	Non Seaside Villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	723	5 785	11,11	88,89
Sumatera Utara	423	5 709	6,90	93,10
Sumatera Barat	132	1 143	10,35	89,65
Riau	254	1 621	13,55	86,45
Jambi	28	1 534	1,79	98,21
Sumatera Selatan	25	3 237	0,77	99,23
Bengkulu	184	1 330	12,15	87,85
Lampung	231	2 423	8,70	91,30
Kepulauan Bangka Belitung	160	231	40,92	59,08
Kepulauan Riau	355	61	85,34	14,66
DKI Jakarta	15	252	5,62	94,38
Jawa Barat	221	5 736	3,71	96,29
Jawa Tengah	355	8 204	4,15	95,85
DI Yogyakarta	33	405	7,53	92,47
Jawa Timur	655	7 841	7,71	92,29
Banten	133	1 419	8,57	91,43
Bali	175	541	24,44	75,56
Nusa Tenggara Barat	297	846	25,98	74,02
Nusa Tenggara Timur	1 018	2 335	30,36	69,64
Kalimantan Barat	158	1 979	7,39	92,61
Kalimantan Tengah	45	1 531	2,86	97,14
Kalimantan Selatan	165	1 843	8,22	91,78
Kalimantan Timur	156	882	15,03	84,97
Kalimantan Utara	56	426	11,62	88,38
Sulawesi Utara	783	1 055	42,60	57,40
Sulawesi Tengah	1 011	1 009	50,05	49,95
Sulawesi Selatan	527	2 522	17,28	82,72
Sulawesi Tenggara	954	1 400	40,53	59,47
Gorontalo	201	533	27,38	72,62
Sulawesi Barat	152	498	23,38	76,62
Maluku	1 064	176	85,81	14,19
Maluku Utara	934	262	78,09	21,91
Papua Barat	572	1 415	28,79	71,21
Papua	662	4 890	11,92	88,08
Indonesia	12 857	71 074	15,32	84,68

SEBARAN BANJIR ROB DI DESA PESISIR INDONESIA 2017-2020

Sebaran banjir rob di tahun 2020



Banjir rob dalam empat tahun terakhir

	2017	2018	2019	2020	Total
	1.484	1.685	1.099	1.148	5.416

“ Lebih dari 12.000 desa pesisir, dan lebih dari 86 pulau kecil terluar (terdepan) akan tenggelam akibat dampak dari krisis iklim. Imbasnya, banyak masyarakat pesisir yang akan menjadi pengungsi karena bencana iklim (*climate refugee*). ”

PULAU YANG MENUNGGU TENGCELAM

tirto.id

1947 - 2014
Kepulauan Solomon
Dari 33 pulau 5 dinyatakan hilang
6 hancur

2005
Indonesia kehilangan 24 pulau

4 Pulau yang Terancam Hilang



POTENSI TENGCELAMNYA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR WILAYAH NKRI

THREATS DROWNING OF NKRI'S OUTERMOST SMALL ISLANDS

Harkins Hendro Prabowo dan Muhammad Salahudin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Jl. Dr. Djundjuran No. 236 Bandung
Email: harkins.prabowo@mgi.esdm.go.id

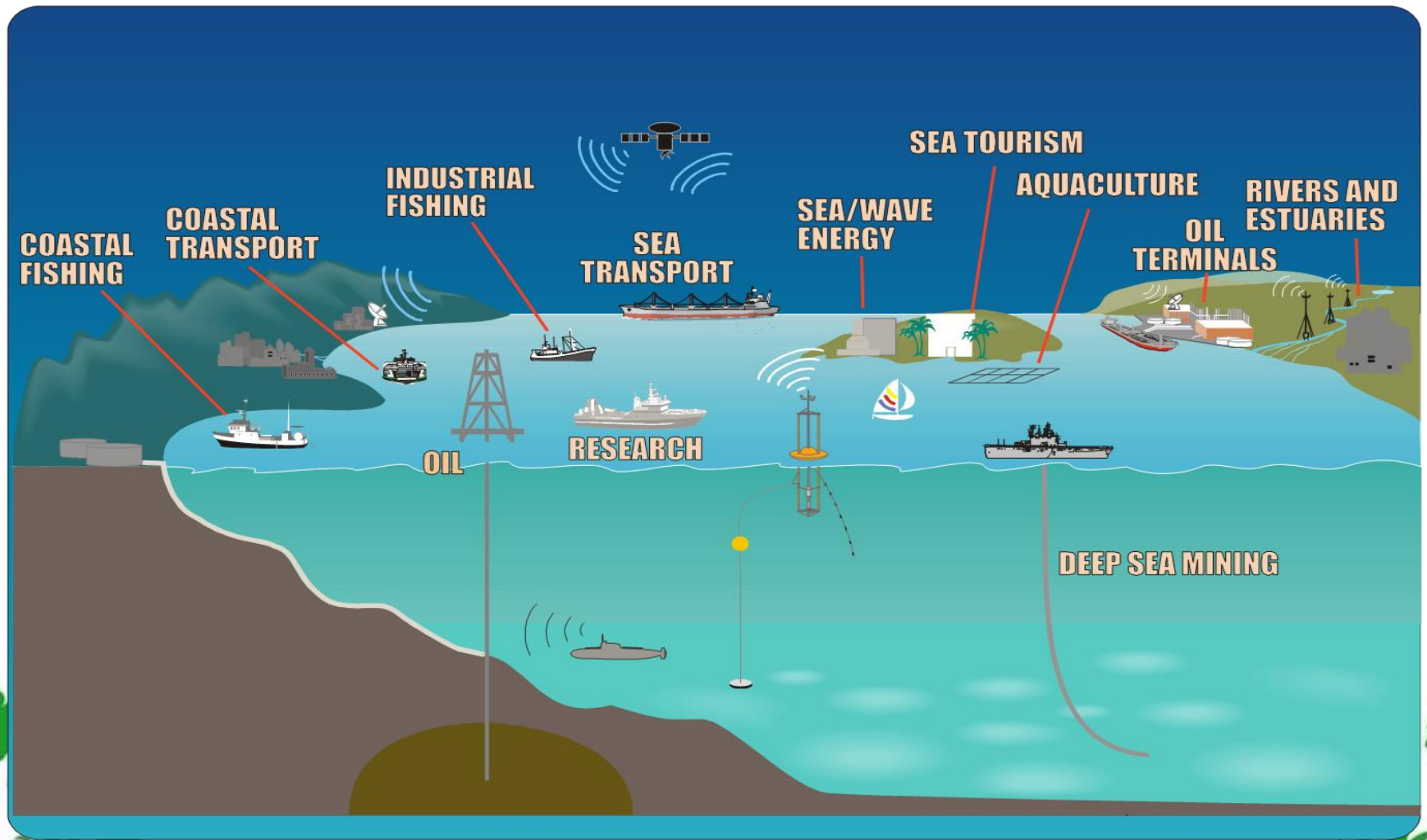
Diterima : 29-03-2016, Disetujui : 05-10-2016

ABSTRAK

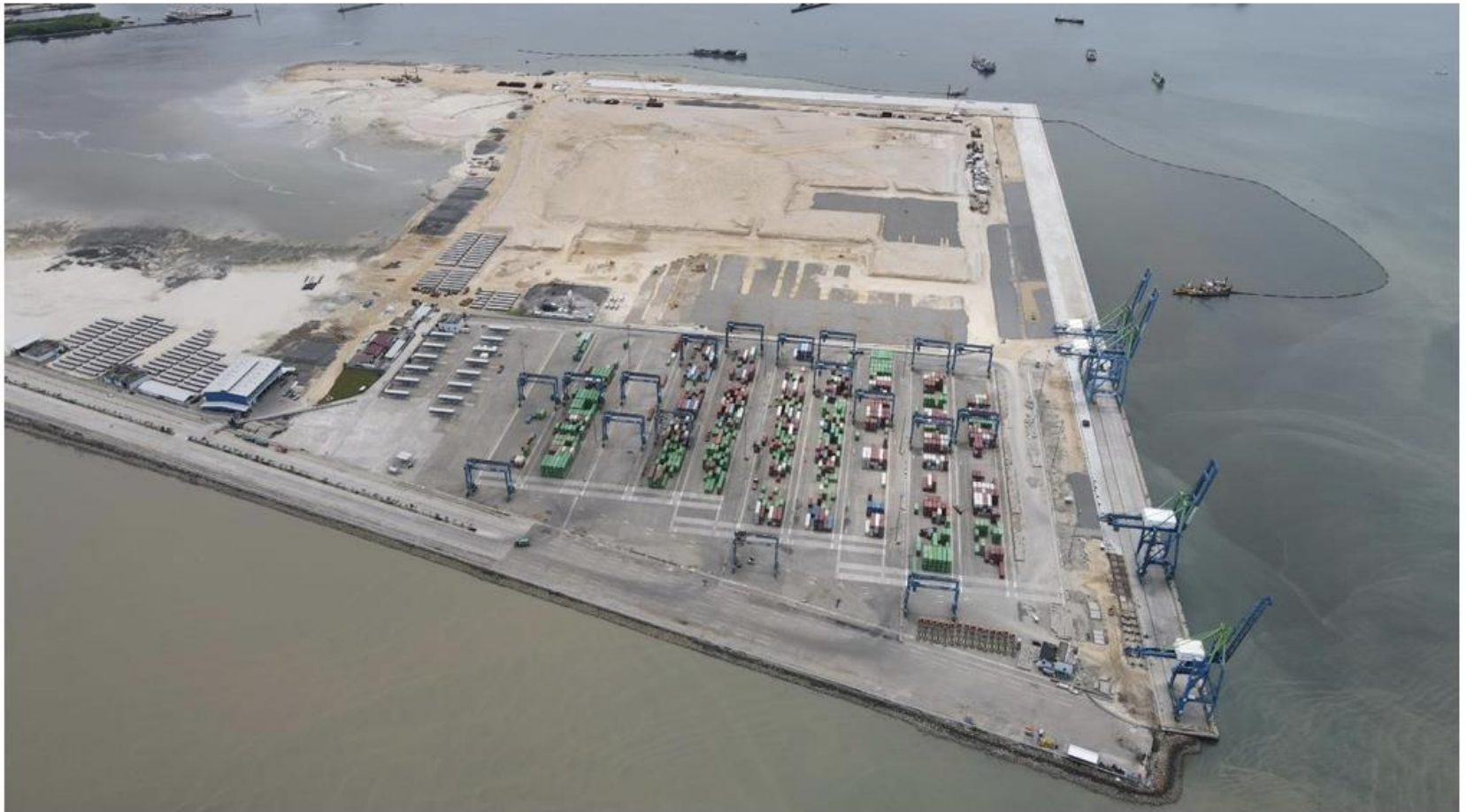
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai 92 pulau-pulau kecil terluar yang berpotensi tenggelam. Kajian ini adalah untuk menganalisis secara genetis pulau-pulau ini terkait dengan sifat fisik batuan terhadap gempa bumi dan perubahan muka air laut. Keberadaan pulau kecil tersebut sebagai lokasi titik pangkal wilayah NKRI. Metode penelitian meliputi analisis spasial dengan cara menumpang susunkan informasi yang termuat dalam masing-masing peta. Jika skenario IPCC terjadi, bencana alam global dengan meningkatnya permukaan laut, maka pulau kecil terluar yang akan tenggelam paling banyak sekitar 83 pulau. Hasil analisis menunjukkan potensi gempa bumi akan berpengaruh terhadap hampir 55 pulau-pulau kecil terluar Indonesia.

Kata kunci: genetis batuan, titik pangkal, pulau-pulau kecil terluar.

Mare Liberum



Reklamasi

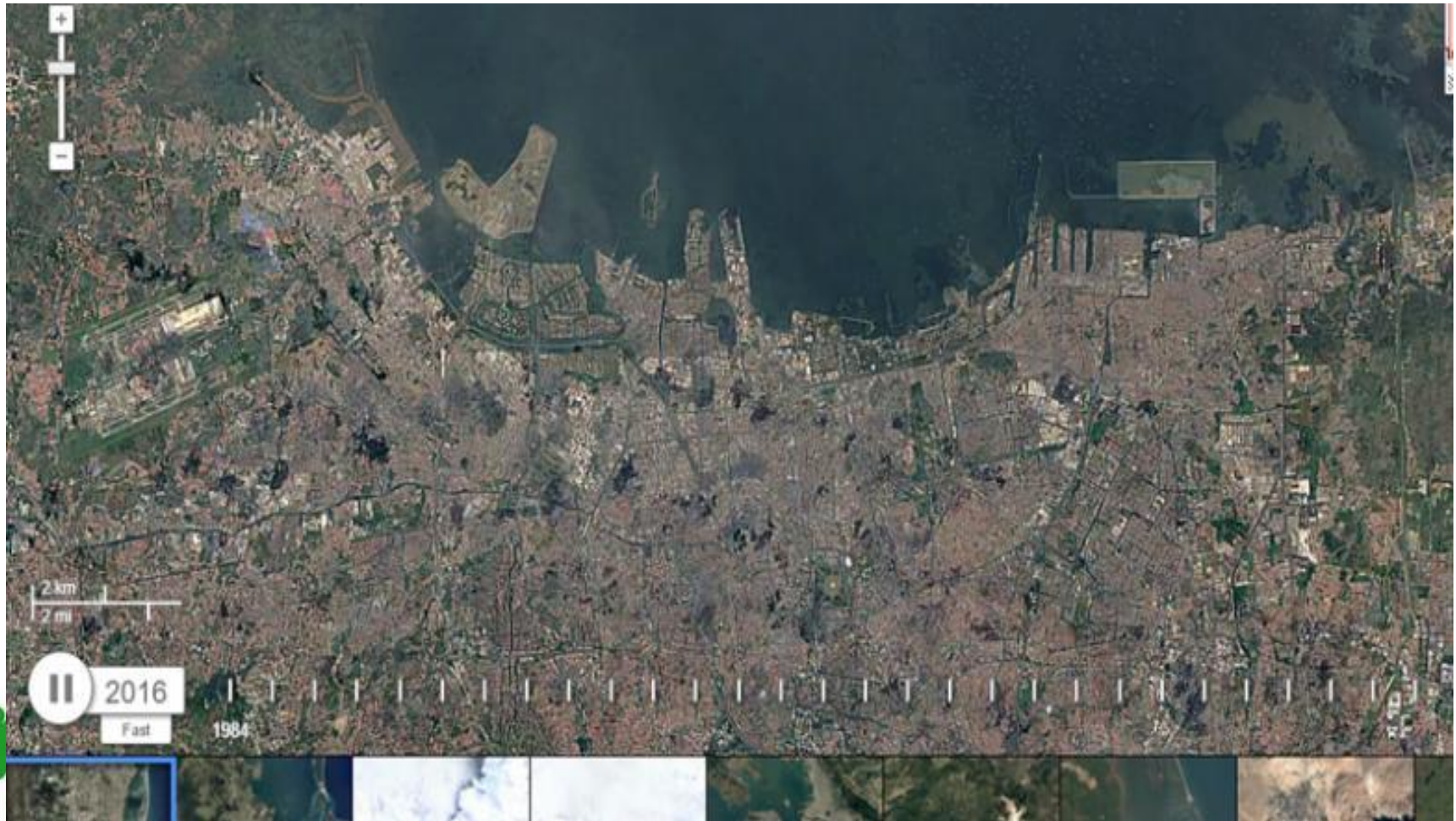


Gambar 5. Proyek Makassar New Port (WALHI Sulsel)

Pertambangan Pasir Laut



Reklamasi Teluk Jakarta



Merumuskan Desakan sebagai berikut



Menyampaikan kepada (Eks) WAMEN

JARING NUSA

POLICY PAPER

URGENSI DAN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENJALANKAN REFORMA AGRARIA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL

2022

The cover features a collage of images: a coastal landscape with a bay and hills, a group of people on a beach with a boat, a large pile of trash on a beach, and a mangrove forest. A map of Indonesia is visible in the background.

Penanggung Jawab:
Asmar Exwar
Bustar Maitar

Penulis:
Parid Ridwanuddin
Yusran Nurdin Massa
Muhammad Al Amin
Gadri Ramadhan Attamimi

Editor:
Mida Saragih

Foto:
Arsip Anggota Jaringan Nusa KTI

Desain dan Tata Letak:
Muhammad Riszky

Profil Jaringan Nusa Kawasan Timur Indonesia
Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia merupakan koalisi dari berbagai organisasi yang fokus terhadap isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan dari Jaringan Nusa KTI sendiri yakni sebagai ruang belajar, berbagi ide dan pengetahuan serta melahirkan aksi dan produk belajar terkait pesisir dan pulau kecil di KTI. Jaringan Nusa KTI dideklarasikan pada 19 Agustus 2021 di Makassar.

Anggota Jaringan Nusa Kawasan Timur Indonesia
Yayasan Econusa
WALHI
WALHI Sulawesi Selatan
WALHI Maluku Utara
Yayasan Hutan Biru
Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia
Yayasan Bonebula
Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Tengah
Japesda Gorontalo
Yayasan Suara Nurani Minaesa
Komnas Desa, Sulawesi Tenggara
Yayasan Pakativa
Tunas Bahari Maluku
Yayasan Jala Ina
Moluccas Coastal Care
Yayasan Tananna Flores
LPSDN Lombok
Perkumpulan Generasi Muda (PGM) Malaumkarta





Kolaborasi Percepat Reforma Agraria

Pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria menghasilkan sejumlah komitmen dari kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengakselerasi reforma agraria yang merupakan program prioritas nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah kembali mengukuhkan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria yang merupakan salah satu program strategis nasional. Kolaborasi semua pihak diperlukan agar reforma agraria berjalan optimal, dan tujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat juga bisa tercapai.

Pengukuhan komitmen untuk mengakselerasi reforma agraria tertuang dalam Deklarasi Wakatobi yang dihasilkan dari pertemuan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (10/6/2022). Sejumlah kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah menyatakan siap berkolaborasi untuk bersama-sama melaksanakan berbagai program reforma agraria.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra mengatakan, reforma agraria tidak bisa hanya dilakukan oleh kementerian ATR/BPN. Dukungan lintas instansi pemerintah dibutuhkan agar reforma agraria berjalan optimal.

"Dukungan mesti diberikan oleh kementerian/lembaga pemerintah daerah karena Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Keuangan dan Investasi (KORPRI/Kemendagri) sebagai *leading sector* tidak bisa bekerja sendiri," kata Surya.

GTRA Summit 2022 digelar untuk membahas berbagai persoalan sekaligus jalan keluar untuk mempercepat reforma agraria. Penyelesaian Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ego sektoral antarkementerian menjadi kendala pelaksanaan reforma agraria. Karena itu, ia meminta semua kementerian untuk menanggalkan ego sektoral agar reforma agraria berjalan secara optimal.

Sementara itu, komitmen bersama di antara kedua-dua, Salah satunya komitmen Badan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (BKSP) dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (GTRP) dan Pesisir-Seluruh Indonesia untuk mewujudkan provinsi dan kabupaten/kota bebas tumpang tindih 2025.

Mereka juga berkomitmen untuk mendorong percepatan penetapan peraturan daerah untuk penataan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk pemukiman di atas air di seluruh wilayah.

Adapun pemerintah pusat berkomitmen secara intensif membangun pengalokasian anggaran untuk percepatan reforma agraria. Tidak hanya, pelaksanaan kebijakan satu peta juga didorong untuk segera teralisasi. Direktur Jenderal Pertanahan Agraria Kementerian ATR/BPN Andi Tjennisa mengatakan, percepatan pelaksanaan norma kebijakan satu peta dilakukan melalui kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi informasi geospasial.

Penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah dan kawasan hutan pun akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan strategi nasional pen-

Runtuhkan Ego Sektoral untuk Reforma Agraria

Ego sektoral antarkementerian dan lembaga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan reforma agraria. Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian dan lembaga menanggalkan ego sektoral tersebut agar reforma agraria dapat berjalan dengan optimal.

WAKATOBİ, KOMPAS — Reforma agraria yang bertujuan mempercepat ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta meningkatkan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain memeri terobosan, pemerintah juga perlu menanggalkan ego sektoral yang ditengarai menjadi kendala dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Dari berbagai program reforma agraria, baru pemberian legalitas tanah rakyat yang berjalan optimal. Sampai saat ini setidaknya sudah 80,6 juta bidang tanah yang bersertifikat. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dari tahun 2015, di mana baru 46 juta dari 126 juta tanah di Indonesia yang bersertifikat.

Sementara itu, program lain, seperti redistribusi tanah dan perhutanan sosial, masih belum optimal. Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari target 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan, baru sekitar 7 persen atau 210.828 hektar yang teralisasi.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ego sektoral antarkementerian menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Presiden men-

>>> BACA JUGA:
Ego Sektoral
 Presiden Jokowi mengungkap bahwa penerbitan sertifikat tanah bagi warga suku Bajo, Sulawesi Tenggara, terganggu oleh ego sektoral antarkementerian. **KOMPAS.ID**
 Klik kompas.id/egosektoral

Tidak berubah
 Presiden menjelaskan, permasalahan di pemerintahan tak berubah. Semua kementerian/lembaga bekerja tidak terintegrasi atau berjalan sendiri-sendiri dengan egonya masing-masing. Jika ini terus berlanjut, berbagai persoalan negara tak akan pernah rampung. Solusi yang ada pun tidak akan bisa terlaksana karena terganggu oleh ego sektoral.

Ego sektoral itu pula yang mengangalkan pelaksanaan program penerbitan sertifikat lahan. Padahal, seandainya lahan bisa merembet dan menumbuhkan masalah baru, Presiden mencontohkan, masyarakat bisa saling bunuh karena sengketa lahan. Konflik masyarakat dengan perusahaan juga terjadi karena sengketa lahan. Selain itu, masyarakat menjadi tak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan atau bank karena tidak memiliki sertifikat sebagai agunan.

contohkan persoalan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk suku Bajo di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang tinggal di atas air.

"Ternyata ributnya antarkementerian. Tidak bisa, Pak, ini haknya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). KLUH (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga. Tidak bisa, Pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di sana ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami," ujar Presiden dalam pembukaan pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

Pertemuan GTRA ini membahas berbagai kendala sekaligus terobosan untuk menyelesaikan persoalan agraria di Tanah Air. Hadir dalam acara itu, antara lain, Menteri

ATR/BPN Sofyan Djajil, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Presiden menjelaskan, permasalahan di pemerintahan tak berubah. Semua kementerian/lembaga bekerja tidak terintegrasi atau berjalan sendiri-sendiri dengan egonya masing-masing. Jika ini terus berlanjut, berbagai persoalan negara tak akan pernah rampung. Solusi yang ada pun tidak akan bisa terlaksana karena terganggu oleh ego sektoral.

Ego sektoral itu pula yang mengangalkan pelaksanaan program penerbitan sertifikat lahan. Padahal, seandainya lahan bisa merembet dan menumbuhkan masalah baru, Presiden mencontohkan, masyarakat bisa saling bunuh karena sengketa lahan. Konflik masyarakat dengan perusahaan juga terjadi karena sengketa lahan. Selain itu, masyarakat menjadi tak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan atau bank karena tidak memiliki sertifikat sebagai agunan.

Runtuhkan Ego Sektoral

(Sambungan dari halaman 1)

Pembangunan jalan tol juga kerap terhambat akibat ego sektoral. "Persoalan kecil, tetapi engak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan kita sendiri. Kan, lucu banget," sindir Presiden.

Ketika dipaksa berkomunikasi, masalah yang tertahan berputih tahun akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam dua minggu. Oleh karena itu, Presiden meminta semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menghentikan ego sektoral demi mengakselerasi reforma agraria.

Presiden juga mengingatkan bahwa ia tidak akan menoleransi kerugian negara dan kerugian masyarakat akibat ego sektoral dan ego lembaga. "Itu cukup. Stop! Persoalan dimulai dari sini. Semua harus membuka diri. Ini saatnya, di forum ini, kita hancurkan tembok sektoral," kata Presiden.

Dalam reforma agraria, ujar Presiden, kebijakan satu peta harus didukung dan digunakan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, tak ada lagi yang menggunakan peta yang berbeda-beda.

Kawasan pesisir

Dalam acara itu, Presiden menyerahkan 525 sertifikat hak guna bangunan kepada warga Kampung Mola yang sebagian tinggal di atas air. Presiden juga menyerahkan sertifikat atas 10 pulau-pulau terluar kepada Kemenhub dan KKP.

Pemberian sertifikat bagi masyarakat pesisir merupakan salah satu program dari reforma agraria. Setelah delapan tahun program itu berjalan, baru kali ini pemerintah berhasil menerbitkan sertifikat untuk wilayah perairan.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djajil mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan KKP sehingga permasalahan bagi warga suku Bajo yang tinggal di atas laut bisa diselesaikan. Pada umumnya, mereka sudah tinggal di atas laut sejak puluhan tahun dan tidak memiliki sertifikat sehingga kesulitan mendapatkan akses ke lembaga keuangan formal dan kepastian hukum.

Kedua kementerian itu kemudian membuat terobosan untuk memberikan HGB kepada masyarakat di Kampung Mola yang berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang. Sertifikat ini sudah lama dinantikan dan diperjuangkan oleh masyarakat suku Bajo.

"Setelah acara ini, kami akan dapat memberikan sertifikat yang sama kepada saudara-saudara kita, suku Anak Laut, dan lain-lain yang sudah turun-temurun tinggal di atas air," ucap Sofyan.

Pendiri dan peneliti Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat, Yando Zakaria, mengatakan, ego sektoral hanyalah permasalahan yang muncul di permukaan. Namun, yang terjadi sesungguhnya adalah munculnya "tangan-tangan tak terlihat" yang mengendalikannya proses di setiap kementerian/lembaga yang seharusnya bekerja sama. Jika kondisi itu dibiarkan, akselerasi reforma agraria akan terus terhambat.

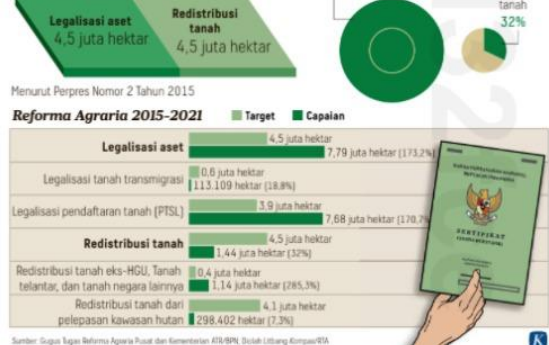
Secara terpisah, Iwan Nurdin dari Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, program reforma agraria yang saat ini dijalankan pemerintah masih jauh panggang dari api. Program yang dijalankan hanya sebatas bagi-bagi sertifikat tanah. Adapun reforma agraria yang diperjuangkan masyarakat sipil selama ini adalah redistribusi tanah kepada masyarakat adat dan membagikan tanah kepada orang yang tak memiliki tanah.

"Apa yang dilakukan kepada suku Bajo di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, itu lebih pada sertifikasi tanah bagi orang yang memang sudah punya tanah. Itu bukan reforma agraria namanya, tetapi sertifikasi mas-sal," ucapnya.

Iwan mengingatkan pemerintah untuk mengembalikan konsep reforma agraria sesuai dengan khittahnya. Tujuan reforma agraria adalah memberikan perlindungan tanah kepada mereka yang berhak, membuat tanah semakin produktif sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, kementerian/lembaga harus membebaskan dirinya dari ego sektoral.

Reforma Agraria

Target pengelolaan aset tanah 9 juta hektar



Desakan pada GTRA Wakatobi

- Reforma agraria di pesisir dan pulau-pulau kecil harus memuat hal-hal pokok, yaitu: **kepastian hak atas tanah (ruang hidup), hak akses dan hak kelola oleh masyarakat.** Hak akses dan hak kelola telah diakui di dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil No. 27/ 2007 yang diubah menjadi UU No. 1/ 2014.



Desakan pada GTRA Wakatobi

- *FAO Voluntary Guideline for Responsible Fisheries and Sustainable Development (2015)*. Pada poin 5 mengenai *governance of tenure in small-scale fisheries and resource management* memberi dua pedoman. **Pertama**, komunitas nelayan kecil perlu untuk mendapatkan hak atas lahan dan sumber daya sebagai basis bagi kehidupan sosial, budaya, mata pencaharian dan penghidupan berkelanjutan mereka. **Kedua**, Negara perlu memastikan nelayan kecil, buruh nelayan, kaum perempuan dan masyarakatnya mendapatkan hak atas area penangkapan dan budidaya serta lahan darat di sekitarnya.



Desakan pada GTRA Wakatobi

- GTRA Summit perlu menjadi ruang untuk mendorong evaluasi dan revisi seluruh regulasi yang menghambat pelaksanaan reforma agraria di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Di antara regulasi yang perlu dievaluasi dan direvisi adalah Peraturan Menteri ATR/BPN No.17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Permen ATR/ BPN No. 17/ 2016 melgalisasi Tanah Reklamasi dan melegalkan penguasaan tanah di pulau kecil, sebanyak 70 persen untuk kepentingan usaha. Sedangkan 30 persen untuk ruang terbuka hijau. 30 persen dari 30 persen untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial.



Deklarasi Wakatobi



- ★ Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendorong percepatan pelepasan kawasan hutan bagi kampung-kampung tua masyarakat adat, lokal dan tradisional yang akan dilanjutkan dengan proses percepatan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah dengan tetap memperhatikan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ★ Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengakomodir percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, lokal dan tradisional, melalui integrasi data terkait antar Kementerian/Lembaga dan kemudahan pelepasan kawasan hutan, pemberian perizinan dan/atau penetapan hak atas tanah sesuai kebutuhan masyarakat adat, lokal dan tradisional, dengan tetap memperhatikan ketentuan berbagai pakai data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ★ Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mencegah perubahan iklim dengan menyusun proses bisnis lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan mangrove yang efektif dan terpadu dengan secara khusus mengakomodir kepentingan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan mangrove secara berkelanjutan, termasuk keterlibatan dan kepentingan perempuan.
- ★ Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjaga kedaulatan wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempercepat dilaksanakannya tindakan administratif bagi 25 pulau kecil terluar yang berada dalam kawasan hutan.



Melayani, Profesional, Terpercaya



3



Deklarasi Bersama

- ★ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendeklarasikan GTRA Summit 2022 sebagai momen kolaborasi lintas sektor untuk selesaikan masalah pertanahan di wilayah Indonesia.
- ★ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepakat untuk melaksanakan Rencana Aksi hasil GTRA Summit 2022 sampai dengan tahun 2023.
- ★ GTRA Summit 2023 disepakati akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.



Wakatobi, 09 Juni 2022

Melayani, Profesional, Terpercaya



4

Catatan

- GTRA Summit 2022 tidak menjadi ruang yang strategis untuk mengevaluasi dan mendorong revisi berbagai regulasi yang tidak melindungi masyarakat pesisir, pulau kecil, termasuk menyelesaikan konflik seperti yang terjadi di Pulau Pari.
- GTRA Summit 2022 melihat adaptasi krisis iklim dengan pengaturan mangrove. Ini bagus. Tetapi tidak cukup, karena banyak sekali proyek yang dijustifikasi oleh ATR/BPN yang memperburuk dampak krisis iklim. Misalnya HGB untuk reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta.
- GTRA Summit 2022 hanya ditempatkan sebagai momentum pemberian 525 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat Suku Bajo selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Padahal, RA itu bukan sertifikasi wilayah perairan, tetapi memastikan wilayah tempat tinggal dan Kawasan tangkap/budidaya terlindungi dari beragam proyek yang merampas.

T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



WARGA PULAU PARI GUGAT HOLCIM ATAS KRISIS IKLIM

Warga Pulau Pari menggugat PT Holcim atas kontribusinya terhadap dampak krisis iklim yang mengancam pulau dan penghidupannya.

TERIMA KASIH

**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI)**

Friends of the Earth Indonesia

**Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Mampang,
Jakarta Selatan www.walhi.or.id**

